

**PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS
INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, PROFITABILITAS, DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
SUSTAINABILITY REPORT (STUDI PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2017)**

**Faizah Naila Sofa
Novita WeningTyas Respati
s.faizahnaila@yahoo.com
nwrespati@ulm.ac.id**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Abstract,

The topics of this research is the disclosure of sustainability reports. The topics of this research is the disclosure of sustainability reports. This study aims to determine board of directors, independent board of commissioners, audit committee, profitability, and firm's size on the sustainability report disclosure in manufacture companies listed in IDX period 2017. Sustainability report disclosure are measured by using indeks global reporting initiative (GRI).

The sample is determined based on purposive sampling method this totaling 85 companies. The data used in this research is secondary data. Analysis technique of data is multiple linear regression.

The result showed that the independent board of commissioners, audit committee, and profitability does not influential positive on the extent of sustainability report whereas the board of directors and firm size has influential positive on the extent of sustainability report. The result of this study also showed that the companies expected to disclose the sustainability report through the meeting of the board of directors and do disclosure in accordance with index GRI.

Keywords: board of directors, independent board of commissioners, audit committee, profitability, firm's size, sustainability report.

Abstrak,

Pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan topik yang diteliti. Tujuan penelitian menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017. Sustainability report pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Global Reporting Initiative (GRI).

Seleksi sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel 85 perusahaan. Data sekunder digunakan dalam riset ini. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil riset membuktikan dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* sebaliknya dewan direksi dan ukuran perusahaan yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan *sustainability report* melalui kinerja dewan direksi yang tercermin dalam rapat yang diselenggarakan dan pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan indeks GRI.

Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen; Dewan Direksi; Komite Audit; Ukuran Perusahaan; Profitabilitas; *Sustainability Report*.

Pandangan tentang tingkat keberhasilan perusahaan kini kian bergeser menjadi semakin luas, yang dulunya hanya dilihat sebatas aspek ekonomi dan sekarang para investor juga memprioritaskan perusahaan yang bertanggung jawab dalam aspek sosial dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tercermin dalam laporan keberlanjutan dan sesuai dengan konsep *triple bottom line* yang terdapat dalam pedoman *Sustainability Report* yang dikeluarkan oleh GRI (Effendi, 2016:213). Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 pengungkapan *sustainability report* wajib hukumnya bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Prakteknya, meski pengungkapan *sustainability report* terus meningkat setiap tahun tetapi masih ada saja perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Terbukti dari 158 perusahaan manufaktur masih terdapat 13 perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report* (BEI, 2018). Dua dari tiga belas perusahaan tersebut yaitu PT Sekar Laut dan PT Siantar Top pernah diberitakan melakukan pencemaran lingkungan yaitu pembuangan limbah cair ke sungai, namun penyelesaiannya hanya sebatas pembayaran kompensasi dan menyebabkan protes masyarakat kembali terjadi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi perusahaan diwajibkan

memiliki komitmen sosial dan lingkungan serta penerapan bisnis yang berkelanjutan, melalui *Good Corporate Governance* (GCG) berupaya memberi keuntungan kepada pemegang saham dan tetap memperhatikan keinginan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dewan direksi sebagai pengelola perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman GCG perusahaan, menjamin kepatuhan perusahaan terhadap aturan serta regulasi yang berlaku (Brooks dan Dunn, 2011:18). Penelitian Raharjo (2016) menunjukkan bahwa dewan direksi mempengaruhi *sustainability report* melalui jumlah rapat yang diselenggarakan dalam satu tahun maka diindikasikan semakin efektif komunikasi yang dilakukan untuk mengupayakan penerapan GCG dan luasnya keterbukaan informasi.

Komisaris independen berperan penting dalam keterbukaan informasi perusahaan karena bertugas secara umum dan/atau khusus untuk mengawasi dewan direksi serta sebagai penengah agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan pemegang saham (UU No.

40 Tahun 2007). Menurut Effendi (2016), proporsi komisaris independen harus minimal 30% karena komisaris independen yang besar jumlahnya diduga mampu meningkatkan objektivitas serta memberikan tekanan kepada perusahaan untuk membuka informasi yang seluas-luasnya (Pujiastuti, 2015).

Komite audit berfungsi untuk menunjang dewan komisaris mengawasi direksi melalui audit laporan keuangan, pelaksanaan manajemen risiko serta perwujudan GCG (IKAI dalam Effendi, 2016:48). Raharjo telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa seringkali penyelenggaraan rapat komite audit akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan pengawasan terhadap dewan direksi dalam menerapkan GCG termasuk mengenai keterbukaan informasi berupa *sustainability report*.

Profitabilitas mampu mencerminkan kinerja finansial suatu perusahaan yang biasanya menjadi perhatian para investor karena mampu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam

mencapai keuntungan. Penelitian Raharjo (2016:31) menyebutkan bahwa tingginya profitabilitas diduga mampu meningkatkan kepercayaan diri perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang luas guna menarik perhatian para investor.

Besarnya ukuran perusahaan mencerminkan banyaknya sumber daya yang dimiliki serta aktivitas yang dilakukan, sehingga perusahaan akan berhubungan dengan lebih banyak stakeholder (Raharjo, 2016; Leimena, 2015). Banyaknya *stakeholder* memotivasi perusahaan untuk menyampaikan *sustainability report* secara lebih luas, bukti tanggung jawab perusahaan (Larassati, 2017).

Berdasarkan fenomena dan tidak konsistennya hasil penelitian, akan diuji kembali pengaruh organ pelaksana GCG, kinerja finansial, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Riset ini merupakan replikasi riset Adila dan Syofyan (2016). Adapun perbedaannya, ditambahkan dewan direksi sebagai variabel independen.

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* memberikan pandangan bahwa perusahaan harus peduli terhadap keinginan berbagai pihak yang terikat dengan perusahaan, di mana “dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus mencermati adanya batasan yang timbul dalam lingkungan dimana mereka beroperasi, seperti masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, serta ekonomi” (Sutedi, 2012:43). Solihin (2014) mengemukakan bahwa dalam mengelola perusahaan, selain memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup, perusahaan perlu memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pihak dalam maupun luar perusahaan yang memiliki peranan dalam perusahaan yang akan mendapatkan imbas dari pengambilan keputusan dan tindakan yang dibuat perusahaan.

Stakeholder menurut Arijanto (2011) terbagi atas eksternal *stakeholder* dan internal *stakeholder*. Internal *stakeholder* adalah karyawan, pemegang saham dan

direksi, sedangkan eksternal *stakeholder* adalah konsumen, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, pesaing, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Perusahaan akan mendapatkan dukungan dari seluruh *stakeholder* ini apabila perusahaan dapat memberikan imbalan sepadan atau lebih besar dari partisipasi yang mereka berikan. Kompensasi tersebut dapat berupa tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan pendekatan model sosial ekonomi.

Pendekatan ini memberikan pandangan di mana perusahaan memiliki kewajiban pada pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, serta masyarakat umum (Pride, Hughes, dan Kapoor, 2014:58). Tanggung jawab yang dilakukan perusahaan kemudian diungkapkan melalui *sustainability report* dan akan memberikan beberapa kontribusi berupa kemampuan, keahlian, modal, dan lain-lain yang akan dibutuhkan perusahaan dalam kegiatan operasional. Maka dari itu meningkatnya imbalan dari

perusahaan, diduga meningkatkan kontribusi yang akan diberikan *stakeholder* (Purwanto, 2011 dalam Raharjo, 2016).

Pengertian *Sustainability Report*

Sustainability report atau laporan keberlanjutan menurut Global Initiative Reporting (2018) adalah “laporan tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi”. *Sustainability report* bisa disebut dengan berbagai istilah yaitu *corporate social responsibility* (CSR), laporan non-keuangan, laporan *triple bottom line*, dan yang lainnya.

Selain ekonomi, sosial, serta lingkungan, laporan keberlanjutan menyajikan nilai-nilai dan model tata kelola perusahaan dan keterikatan terhadap ekonomi global yang berkelanjutan (*Global Initiative Reporting*, 2018). Akibatnya konsep pertanggung jawaban *single bottom line* (nilai perusahaan diukur dari kinerja keuangan saja) tidak digunakan kembali, melainkan menerapkan teori *triple bottom line*

di mana melibatkan aspek keuangan, sosial dan lingkungan. Kemajuan perusahaan secara berkelanjutan tidak hanya diukur dari kondisi keuangan saja (Arijanto, 2011:138).

Sustainability report menurut GRI “diajukan oleh perusahaan dan organisasi dari semua jenis, ukuran dan sektor dari setiap sudut dunia”. Pemerintah Indonesia juga telah menghasilkan beberapa peraturan mengenai kewajiban pengungkapan laporan keberlanjutan, yaitu “Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Peraturan OJK Nomor 51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik”. Banyak manfaat yang akan perusahaan dapatkan jika melakukan pengembangan keberlanjutan dan mengungkapkannya, sedangkan jika perusahaan tidak membuat pengungkapan laporan keberlanjutan akibatnya ada sanksi yang diberikan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 berupa sanksi administratif.

Ada 5 mekanisme yang dilakukan dalam proses penyajian *sustainability report*, yaitu pertama perusahaan harus membuat kebijakan mengenai pengembangan yang berkelanjutan dan kemudian mengungkapkannya. Kedua, masyarakat mengharapkan barang dan jasa ramah lingkungan sehingga perusahaan harus menentukan standar kinerja serta *sustainability reporting* untuk rantai pemasok (*supply chain*). Ketiga, mengungkapkan keterlibatan pemangku kepentingan. Keempat, perusahaan diminta mengembangkan dan melaporkan aspek-aspek kinerja *sustainability* dan harus memberikan penjelasan jika belum melakukannya. Kelima, rating, *benchmarking*, pajak, subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan, kewajiban, serta larangan (Effendi, 2016:212).

Panduan untuk melakukan pelaporan keberlanjutan atau tanggung jawab sosial adalah GRI *Sustainability Reporting Guidelines* dari *Global Reporting Initiative*.

Rerangka kerja *Global Reporting Initiative* diperbaiki secara periodik dan pada tahun 2015, *The Fourth Generation* (G4) dari rerangka kerja keberlanjutan *Global Reporting Initiative* telah dikeluarkan di Amsterdam, Belanda. *Global Reporting Initiative G4 Guideliness* (*Global Reporting Initiative*, 2018) meliputi 3 indikator kinerja ekonomi, sosial, serta lingkungan yang terdiri dari beberapa komponen. Total indikator kinerja berdasarkan GRI G4 adalah 91 meliputi 9 indikator kategori ekonomi, 34 indikator kategori lingkungan, dan 48 indikator kategori sosial yang mencakup 4 sub-kategori yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja sebanyak 16 indikator, hak asasi manusia dengan 12 indikator, masyarakat dengan 11 indikator, serta tanggung jawab atas produk/barang dengan 9 indikator.

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Tugas pokok dewan direksi selain mengelola perusahaan secara menyeluruh adalah membuat laporan untuk pemegang saham dan

pemerintah, memastikan ketaatan perusahaan terhadap hukum serta regulasi yang berlaku (Brooks dan Dunn, 2011:18). Dewan direksi juga memiliki kewajiban dalam penyusunan pedoman perusahaan dalam menerapkan GCG (Effendi, 2016:26). Secara berkala dewan direksi mengadakan rapat dalam rangka melaksanakan koordinasi dan melancarkan komunikasi. Menurut Raharjo (2016) “kinerja direksi yang bagus akan dapat menciptakan *good corporate governance* bagi perusahaan”. Bertambah baik kinerja dewan direksi, akan semakin kuat GCG yang diterapkan oleh perusahaan sehingga diduga meningkatkan upaya perusahaan melakukan kewajiban sosial dan mengungkapkannya (Awalia, Anggraini, dan Prihatni, 2015).

H1: Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Peraturan OJK No. 33/POJK/0.4/2014 telah mengatur

mengenai keanggotaan dewan komisaris yang mana jumlah dewan komisaris independen minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Effendi, 2016:37). Menurut Adila dan Syofyan (2016) “keefektifan pengendalian aktivitas perusahaan dipengaruhi dengan bagaimana dewan komisaris independen dibentuk dan diorganisir”. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen diindikasikan semakin kritis dan berdaya guna pengendalian yang dilaksanakan direksi, kemudian hal ini diduga akan meningkatkan tuntutan mengenai pengungkapan *sustainability report* (Adila dan Syofyan, 2016).

H2: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Tugas komite audit yaitu mendukung dan menguatkan fungsi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan (Effendi, 2016:48). Komite audit diposisikan sebagai

perantara dewan direksi dengan auditor internal, auditor eksternal, dan anggota independen, yang bekerja memonitor aktifitas direksi agar sesuai dengan hukum dan regulasi (Raharjo, 2016).

Tujuan peyusunan komite audit berdasarkan Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) dalam Effendi (2016:55) yakni melaksanakan menyelenggarakan pengawasan independen terhadap laporan keuangan dan audit eksternal, proses risiko dan kontrol, serta tata kelola perusahaan. Komite audit juga bertanggung jawab dalam pengawasan terkait kualitas keterbukaan perusahaan baik informasi keuangan maupun non-keuangan (Adila dan Syofyan, 2016).

“Keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 menerangkan bahwa komite audit menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketetapan minimal rapat dewan komisaris yang ditentukan anggaran dasar perusahaan” (Raharjo, 2016). Meningkatnya frekuensi rapat diindikasikan meningkatnya

komunikasi dan koordinasi komite audit, sehingga diduga semakin tinggi pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dan manajemen risiko termasuk didalamnya mengenai keterbukaan informasi yaitu *pengungkapan sustainability report* (Raharjo, 2016).

H3: Komite Audit Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengaruh Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Rasio profitabilitas mampu menggambarkan efektivitas kinerja manajemen perusahaan dari aspek keuangan. Profitabilitas yang tinggi memikat perhatian para investor dan kreditor, sebab menunjukkan kemampuan keuangan yang baik. Peningkatan profitabilitas, diduga meningkatkan informasi yang diungkapkan perusahaan dengan *sustainability report* (Raharjo, 2016).

H4: Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengaruh Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap

Pengungkapan Sustainability Report

Perusahaan yang lebih besar biasanya mempunyai sumber daya dan aktivitas yang banyak sehingga berhubungan dengan lebih banyak *stakeholder*. Banyaknya pihak yang terkait dengan perusahaan menyebabkan dorongan kepada perusahaan untuk melakukan transparansi informasi menjadi lebih tinggi, hal tersebut dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan pada segenap *stakeholder*-nya sehingga semakin besar perusahaan diduga meningkatkan luas pengungkapan SR (Raharjo, 2016).

H5: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

METODE

Seleksi sampel memakai *purposive sampling*. Sampel untuk analisis data sebanyak 89 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Perusahaan manufaktur paling banyak berinteraksi dengan *stakeholder* khususnya masyarakat dan

lingkungan. Penentuan sampel berdasarkan beberapa kriteria:

Tabel 2. Prosedur Seleksi Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017	158
Perusahaan yang melaporkan SR selama periode penelitian yaitu tahun 2017	145
Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan lengkap sesuai data yang diperlukan dalam penelitian pada tahun 2017	89
Jumlah perusahaan sampel yang memenuhi kriteria	89

Sumber: Diolah penulis (2019)

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Sumber
Dewan Direksi (X1)	Organ,05 perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan perusahaan	Jumlah rapat dalam satu tahun	Effendi (2016)
Dewan Komisaris Independen (X2)	Dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan terafiliasi apapun dengan perusahaan dan tidak bekerja rangkap dengan perusahaan	Proporsi komisaris independen	Effendi (2016)
Komite Audit (X3)	Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris guna membantu dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan	Jumlah rapat dalam satu tahun	IKAI dalam Effendi (2016)
Profitabilitas (X4)	Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu	$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$	Wasesa, dkk (2016)
Ukuran Perusahaan (X5)	Skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan	$Ln = \text{Total Aset}$	Aharjo (2016)
Sustainability Report (Y)	Laporan yang dibuat perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh stakeholder yang berisi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan	$SRDi = \sum \frac{Xi}{ni}$	Effendi (2016)

Sumber: Diolah penulis (2019)

Teknik Analisis Data DD Dewan Komisaris
menggunakan Pengujian hipotesis DKI Dewan Komisaris
mengaplikasikan model regresi Independen
berganda: KA Komite Audit

$$SRI = a + b1DD + b2DKI + b3KA + b4P + b5UP$$

Keterangan:

Sri Pengungkapan Sustainability Report

UP Ukuran Perusahaan

α Konstanta

e Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Regresi berganda menguji pengaruh dewan direksi, proporsi komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Uji asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas,

heteroskedastisitas, dan autokorelasi) untuk menjamin persamaan regresi mempunyai ketepatan estimasi, tidak bias dan konsisten.

Normalitas diuji menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai 0,713 dan signifikansinya senilai 0,689 yang mana $>0,05$, kesimpulan data residual dapat secara normal terdistribusi.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06470856
	Absolute	.076
Most Extreme Differences	Positive	.076
	Negative	-.042
Kolmogorov-Smirnov Z		.713
Asymp. Sig. (2-tailed)		.689

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2019.

Berdasarkan Tabel 6, nilai tolerance dari seluruh variabel independen adalah lebih dari 0,1 dan

nilai VIF tidak lebih dari 10, maka tidak terjadi korelasi (Ghozali, 2016).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
dewan direksi	.917	1.091
dewan komisaris	.977	1.024
independen		
komite audit	.876	1.141
ROA	.934	1.070
SIZE	.907	1.103

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2019.

Sebagaimana dasar heteroskedastisitas. Tingkat pengambilan keputusan pada uji signifikansi dari seluruh variabel park, tidak terjadi gejala adalah $>0,05$. (Ghozali, 2016).

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-11.804	3.893		-3.032	.003
Dewan Direksi	.028	.021	.145	1.322	.190
Komisaris Independen	-2.855	2.039	-.149	-1.400	.165
Komite Audit	.010	.045	.026	.231	.818
Profitabilitas	-.481	2.025	-.026	-.237	.813
Ukuran Perusahaan	.460	.319	.159	1.443	.153

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2019.

Tabel 8. menunjukkan bahwa 2,005 $>$ 1,7754 dan 2,005 $<$ 2,22 nilai DW 2,005 dan diketahui bahwa sehingga didapat kesimpulan model nilai dU adalah 1,7754, maka dari itu regresi bebas autokorelasi.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.506 ^a	.256	.211	.06663	2.005

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2019.

Bukti empiris menunjukkan dewan direksi dan size berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, dengan melihat taraf signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya komisaris independen, komite audit, serta profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* karena signifikansi $>0,5$.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Riset menunjukkan H1 diterima, didukung dengan nilai koefisien dari dewan direksi yaitu 0,002 dan tingkat signifikansinya $0,027 < 0,05$. Seringnya rapat yang diadakan dewan direksi terbukti akan meningkatkan efektivitas komunikasi antar anggota direksi sehingga GCG yang diterapkan dan keterbukaan informasi perusahaan juga meningkat. Tingginya frekuensi jumlah rapat dewan direksi akan meningkatkan efektivitas komunikasi antar anggota direksi sehingga GCG yang diterapkan dan keterbukaan informasi perusahaan juga meningkat. Hal ini didukung dengan

data, PT. Astra Internasional, Tbk yang menyelenggarakan rapat dewan direksi sebanyak 32 kali mengungkapkan SR sebesar nilai 0,30, PT. Indofarma, Tbk menyelenggarakan rapat dewan direksi sebanyak 26 kali mengungkapkan SR sebesar nilai 0,31, PT. Kimia Farma, Tbk menyelenggarakan rapat dewan direksi sebanyak 51 dan mengungkapkan SR sebesar nilai 0,33 serta PT. Semen Indonesia, Tbk yang menyelenggarakan rapat dewan direksi sebanyak 56 kali mengungkapkan SR sebesar nilai 0,27. Sebaliknya PT. Inti Agri Resources, Tbk yang menyelenggarakan rapat dewan direksi sebanyak 5 kali hanya mengungkapkan SR sebesar nilai 0,07 dan PT. Sepatu Bata, Tbk yang menyelenggarakan rapat dewan direksi sebanyak 4 kali hanya mengungkapkan SR sebesar nilai 0,08.

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Sustainability Report

Uji H2 ditolak karena nilai koefisien dari komisaris independen

0,006 dan nilai signifikansinya 0,930. Pengujian menunjukkan dewan komisaris tidak mempengaruhi *sustainability report*. Dewan komisaris sebagai dewan pengawas berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 memiliki tugas utama melindungi kepentingan pemegang saham dan mengawasi kinerja direksi melalui aspek keuangan sehingga tidak dapat dibuktikan berpengaruh langsung terhadap luasnya pengungkapan *sustainability report*. Proporsi komisaris independen PT. Unilever Indonesia, Tbk dan PT. Suparma, Tbk adalah sebesar 80% dan nilai SR yang diungkapkan hanya sebesar 0,15 dan 0,05. Hal ini dikarenakan tugas utama dewan komisaris PT. Unilever Indonesia, Tbk dan PT. Suparma, Tbk adalah menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, melakukan pengawasan manajemen risiko dan direksi dalam pengelolaan perusahaan berupa rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan komite audit.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Hasil uji H3 ditolak karena signifikansi $0,374 > 0,05$ dan koefisiennya sebesar 0,001. Komite audit sebagai komite yang berfungsi memperkuat pengawasan komisaris terhadap perusahaan memiliki tugas utama yaitu menindak lanjuti temuan auditor internal yang berhubungan dengan pelaporan keuangan (Peraturan OJK No 55 Tahun 2015). Komite audit dalam menjalankan tugasnya berfokus menyelesaikan temuan-temuan audit serta menelaah pengaduan dalam perusahaan dan tidak berfokus pada luas pengungkapan *sustainability report* secara langsung. Bukti empiris menunjukkan PT. Waskita Beton Precast, Tbk yang menyelenggarakan rapat komite audit sebanyak 24 kali hanya mengungkapkan *sustainability report* dengan nilai 0,13 dikarenakan dalam agenda rapatnya banyak membahas mengenai laporan keuangan, laporan rutin SPI, serta tindak lanjut atas temuan SPI, begitu juga dengan PT. Martina Berto, Tbk yang menyelenggarakan rapat komite audit sebanyak 20 kali hanya mengungkapkan *sustainability report* dengan nilai 0,11.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Bukti empiris memperlihatkan nilai koefisien ROA adalah -0,041 dengan tingkat sig. 0,532 sehingga disimpulkan bahwa H4 ditolak. Tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi SR dikarenakan hukum dari pengungkapan laporan ini adalah wajib sehingga baik perusahaan dengan ROA tinggi maupun rendah, semuanya melakukan pengungkapan SR. Tinggi rendahnya profitabilitas tidak berdampak pada pengungkapan *sustainability report* dikarenakan pengungkapan *sustainability report* hukumnya adalah wajib sehingga perusahaan dengan profitabilitas yang rendah pun juga menginformasikan *sustainability report*. Data memperlihatkan PT. Kalbe Farma, Tbk yang memiliki ROA sebesar 14% serta PT. Merck, Tbk dengan nilai ROA 17% hanya mengungkapkan *sustainability report* sebesar nilai 0,08 dan 0,05 sedangkan PT. Central Proteina Prima, Tbk yang nilai memiliki nilai

ROA sebesar -38% dapat mengungkapkan *sustainability report* sebesar nilai 0,12.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Uji hipotesis H5 diterima didukung tingkat signifikansi $0,000403 < 0,05$ dan nilai koefisiennya 0,038. Perusahaan besar yang memiliki banyak aset dan banyak aktivitas serta berhubungan dengan lebih banyak *stakeholder* terbukti mengungkapkan laporan keberlanjutan secara lebih luas sebagai alat komunikasi dan bentuk tanggungjawab perusahaan kepada semua *stakeholder*. Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan besar yang memiliki banyak aset dan banyak aktivitas serta berhubungan dengan lebih banyak *stakeholder* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* yang merupakan alat komunikasi dan bentuk komitmen perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut didukung dengan data PT. Astra Internasional, Tbk yang mempunyai aset terbanyak secara keseluruhan Rp.

295.646.000.000.000

mengungkapkan *sustainability report* sebesar nilai 0,30 dan PT. Indofarma, Tbk sebesar Rp. 1.529.875.000.000 mengungkapkan *sustainability report* sebesar nilai 0,31, sebaliknya PT. Yanaprima Hastapersada, Tbk yang hanya memiliki total aset keseluruhan sebesar 303.543.000.000 hanya mengungkapkan *sustainability report* sebesar nilai 0,10.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Uji empiris membuktikan Dewan direksi dan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Komisris independen, komite audit, dan profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Terdapat keterbatasan riset, diantaranya: (1) adanya unsur subjektivitas yang tinggi dalam pengukuran indeks pengungkapan, (2) penggunaan sistem *checklist* dalam penentuan indeks pengungkapan menyebabkan kurangnya penilaian terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*.

Saran

Peneliti yang akan datang diharapkan:

1. Menambahkan periode penelitian atau melakukan penelitian pada perusahaan selain manufaktur seperti perusahaan pertambangan, real estate, dan lain sebagainya.
2. Menggunakan *content analysis* untuk pengukuran *sustainability report* sehingga dapat dilihat atau dinilai tingkat keluasaan dan kedalaman pengungkapan *sustainability report*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, W., & Syofyan, E. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2014. *Jurnal WRA, Vol 4, No 2*.
- Anggiyani, S. W., & Yanto, H. (2016). Determinan Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Accounting Analysis Journal, Vol.5, No. 2, Hal. 1-10*.

- Arijanto, A. (2011). *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Awalia, E. N., Anggraini, R., & Prihatni, R. (2015). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Leverage, dan Aktivitas Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol. 10, No. 2.
- Brooks, L. J., & Dunn, P. (2012). *Etika Bisnis dan Profesi: Untuk Direktur, Eksekutif, dan Akuntan (Edisi 5) Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bursa Efek Indonesia. (2018, Oktober 10). Diambil kembali dari <http://www.idx.id>
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahminuddin, M. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance Terhadap Sustainability Report pada Perusahaan BUMN yang Listed di BEI*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, N., Syam, D., & Jati, A. W. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5 No.1, Hal 711-720.
- Ikhsan, A., Muhyarsyah, Tanjung, H., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Larassati, M. (2017). *Pengaruh Current Ratio, Ukuran Perusahaan, dan Return on Asset Terhadap Pengungkapan CSR*. Skripsi. Universitas Lambung Mangkurat.
- Leimena, Y. Y. (2015). *Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan*. Skripsi. Universitas Lambung Mangkurat.
- Marwati, C. P., & Yulianti. (2015). Analisis Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 7, No. 2, Hal. 167-181.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014

- tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Raharjo, F. D. (2016). *Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report*. Skripsi. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.